



**PEMERINTAH
KABUPATEN PATI**

Laporan Tahunan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2021**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati**

2022

Laporan Tahunan

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2021

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI**

Jl. Kolonel Sugiyono No. 77 Pati Telp. (0295) 383231 Fax. 384324
email : kesbangpolkabpati@gmail.com



Kata Pengantar

Puji syukur kami persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh staf di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat bermanfaat.

Pati, Februari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI



Ikhtisar Eksekutif

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati pada tahun 2021 telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah arah dan tolok ukur yang jelas dari rumusan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, sehingga dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya akuntabilitas kinerja yang lebih jelas dan terukur. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati serta indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018. Dari 2 indikator kinerja utama semua indikator dapat tercapai, dan dilihat dari rata-rata capaian yaitu sebesar **190%** dengan rata-rata capaian **sangat baik**.

Realisasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan pada tahun 2021 ini dikarenakan capaian realisasi anggaran kegiatan mencapai **98,60%** (hal ini sebagian besar disebabkan efisiensi anggaran dan dikembalikan ke kas Negara), sedangkan rata-rata realisasi fisik kegiatan mencapai 100% walaupun ada 3 kegiatan yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena refocusing. Meskipun secara umum kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sudah baik namun tidak dipungkiri terdapat beberapa kendala dan permasalahan sehingga masih perlu perbaikan dan berbagai strategi untuk menghadapi masa yang akan datang. Disamping itu akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta berkelanjutan (*sustainable*) dengan segenap bantuan dari seluruh pihak yang terkait demi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud.



Daftar Isi

Pengantar **II**

Ikhtisar Eksekutif **III**

Daftar Isi **IV**

Daftar Gambar/ Tabel **V**

BAB	1	Pendahuluan 1 Latar Belakang 1 Dasar Hukum 2 Isu Strategis 3 Struktur Organisasi 4 Sumber Daya Manusia 6 Sarana Prasarana 8 Sistematika Penyajian 10
BAB	2	Perencanaan Kinerja 11 Perencanaan Strategis 11 Perjanjian Kinerja 16
BAB	3	Akuntabilitas Kinerja 18 Indikator Kinerja Utama 18 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 20 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 22 Realisasi Anggaran 33
BAB	4	Penutup 36 Kesimpulan 36 Rencana Tindak Lanjut 36

Daftar Gambar/Tabel

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati 5
Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon 2021 7
Tabel 1.2	Pegawai Menurut Pendidikan 7
Tabel 1.3	Pegawai Menurut Golongan 7
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Per Bidang 8
Tabel 1.5	Aset Fisik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati 8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati 13
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 14
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dan Target Kinerja Tahun 2021 19
Tabel 3.2	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 20
Tabel 3.3	Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati 21
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Tahun 2021 23
Tabel 3.5	Realisasi Program Pendidikan Politik Masyarakat yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 24
Tabel 3.6	Realisasi Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 25
Tabel 3.7	Realisasi Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 26
Tabel 3.8	Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 27
Tabel 3.9	Realisasi Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 29
Table 3.10	Capaian Kinerja Tahun 2021 33
Table 3.11	Realisasi Anggaran Tahun 2021 34

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah menjadi PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati Pati dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2016–2021.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 119 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

C. Isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pati yaitu :

1. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengalaman terhadap empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Merosotnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengalaman nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.

3. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam Pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
4. Kurangnya tingkat kewaspadaan dini dan masih belum optimalnya kinerja dalam rangka mendeteksi dini mencegah dini bencana sosial dan bencana alam di masyarakat.
5. Masih sering terjadinya kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam Pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah dan konflik lahan dan sumber daya alam.

Sedangkan untuk permasalahan internal antara lain:

1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang belum mencukupi dan belum mampu mendukung operasional pelaksanaan tupoksi;
3. Terkait penguatan jejaring (*networks*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai pihak pemangku kepentingan.

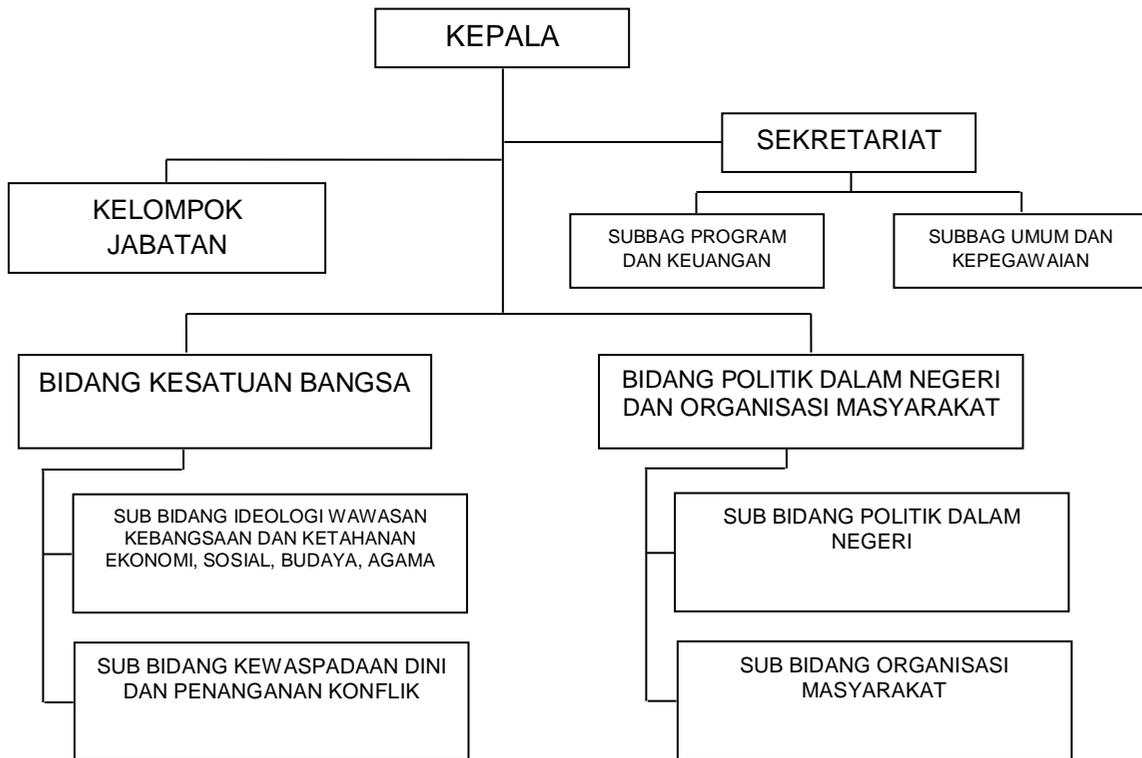
D. Struktur Organisasi

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada tahun 2020 organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggantikan Kantor Kesatuan Bangsa. Dalam hal ini di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati berubah status menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sehingga struktur organisasi berbeda dari tahun sebelumnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Pelaksanaan tugas sehari-hari, dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan 2 (dua) Bidang yang membawahi 4 (empat) Sub Bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati



Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Bupati.

E. Sumber Daya manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 29 orang, jumlah tersebut terdiri dari 16 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 13 orang Harlep (Non PNS). Dari 29 orang pegawai tersebut, sebanyak 17 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon 2021

No	Jenis Kelamin	Ekselon II	Ekselon III	Ekselon IV	Staf	Harlep	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	1	2	2	3	9	17
2	Perempuan	-	1	4	3	4	12
Jumlah Keseluruhan		1	3	6	6	13	29

Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati :

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 2 Orang
4. Kepala Sub Bidang : 4 Orang
5. Kepala Sub Bagian : 2 Orang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 10 orang, sedangkan jumlah keseluruhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Pati berjumlah 29 orang, yang terklarifikasi dalam tingkat pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pegawai Menurut Pendidikan

No	Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	Harlep	ASN	Harlep	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	1	-	-	-	1
2	SLTP	1	-	-	-	1
3	SLTA	1	7	2	-	10
4	D1-D3, Sarjana Muda	-	-	1	1	2
5	D4, S1	3	2	-	3	8
6	S2	2	-	5	-	6
Jumlah Keseluruhan		8	9	8	4	29

Tabel 1.3
Pegawai Menurut Golongan

No	Klasifikasi	Gol 1	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	8
1	Laki-laki	-	2	4	2	9
2	Perempuan	-	-	6	2	9
Jumlah Keseluruhan		-	2	10	4	16

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik, hal ini dapat di lihat pada tabel 1.2. Dengan kualitas SDM yang ada saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tetap mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tabel. 1.4
Komposisi Pegawai Per Bidang

No	Klasifikasi	Sekretariat		Bidang Kesatuan Bangsa		Bidang Poldagri dan Ormas	
		ASN	Harlep	ASN	Harlep	ASN	Harlep
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-laki	2	7	3	2	3	-
2	Perempuan	4	2	2	1	2	1
	Jumlah	6	9	5	3	5	1

Dari tabel diatas, komposisi pegawai per bidang masih terdapat kekurangan pegawai terutama di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat yang hanya berjumlah 6 orang. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati masih belum mempunyai petugas intelijen, hal tersebut diharapkan menjadi masukan bagi Perangkat Daerah yang menangani tata laksana kepegawaian untuk mengisi sesuai formasi dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

F. Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari :

Tabel 1.5
Aset Fisik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah (unit)	Nilai
		Baik	Tidak baik		
1	2	3	4	5	6
	TANAH				
1.	Tanah	1	-	1	272.000.000
	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1.	Bangunan gedung kantor	1	-	1	1.179.930.270
	ALAT ANGKUTAN				
1.	Mobil	1	2	3	419.415.000
2.	Kendaraan Roda 2	9	5	14	178.970.000

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah (unit)	Nilai
		Baik	Tidak baik		
1	2	3	4	5	6
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1.	Mesin Ketik Manual	4	-	4	2.320.000
2.	Lemari Besi	2	5	7	4.520.000
3.	Rak Besi/Metal	8	-	8	11.720.000
4.	Rak Kayu	1	-	1	2.250.000
5.	Filling Besi/Metal	11	12	23	28.950.000
6.	Brangkas	1	-	1	2.508.750
7.	Papan Nama Instansi	1	-	1	2.500.000
8.	White Board	4	-	4	1.495.000
9.	Mesin Absensi	1	1	2	10.860.850
10.	Overhead Proyektor	-	1	1	19.100.000
11.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	4	4	5.800.000
12.	Lemari Kayu	4	-	4	1.800.000
13.	Meja Rapat	5	-	5	8.500.000
14.	Kursi Putar	1	-	1	250.000
15.	Kursi Lipat	26	-	26	49.580.000
16.	Meja Komputer	4	1	5	3.475.000
17.	Sofa	1	-	1	9.200.000
18.	AC Unit	1	-	1	3.700.000
19.	AC Split	6	2	8	40.110.000
20.	Kipas Angin	2	1	3	2.105.000
21.	Televisi	1	3	4	9.500.000
22.	Sound System	1	-	1	8.050.000
23.	Wirelesess	-	1	1	8.000.000
24.	Microphone	-	4	4	11.165.000
25.	Handy Cam	-	1	1	7.705.000
26.	Alat Pemadam Portable	1	-	1	1.500.000
27.	Local Area Network (LAN)	1	-	1	1.242.000
28.	P.C Unit	7	1	8	70.100.000
29.	Laptop	5	4	9	104.650.000
30.	Printer	9	2	11	27.000.000
31.	Monitor	1	-	1	1.300.000
32.	Modem	-	1	1	350.000
33.	Peralatan Jaringan Lain-lain	4	-	4	12.452.000
34.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1	1.200.000
35.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	16	11	27	3.695.000
36.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	1	1.000.000
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	-	4	6.750.000
38.	Kursi Kerja Pegawai Non struktural	18	22	40	27.600.000
39.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	-	3	2.760.000
40.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	-	2	2	600.000
41.	Camera + Attachment	-	1	1	2.275.000
42.	Unintemptibl Power Suplay (UPS)	1	1	2	1.602.000
43.	Camera Elektronik	1	2	3	11.800.000
44.	Facsimile	-	1	1	4.000.000
45.	Personal Komputer	1	-	1	8.800.000
46.	Tape Recorder	1	-	1	875.000
47.	Alat Keamanan Lain-lain	1	-	1	6.000.000
48.	Transportable Water Pomp	1	-	1	4.200.000

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun anggaran 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan ;

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja;

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja;

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV : Penutup.

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidasi dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan lima tahun (2017-2022). Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah: "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK". Untuk mewujudkan Visi tersebut telah dituangkan kedalam delapan (8) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sesuai dengan tupoksinya, mengambil fokus dalam membantu mewujudkan **Misi ke-1** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu: “Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal” dengan cara Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pati yang Aman, Tenram, Demokratis, Kondusif dan Dinamis Dilandasi Semangat Persatuan dan Kesatuan yang Kokoh.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2017–2022 disusunlah suatu perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang harus dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati sepenuhnya dapat dirujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penetapan kinerja yang dibuat awal tahun 2021 telah ditetapkan dalam DPA Tahun 2021 antara dengan Kepala Badan dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, dan antara Kepala Bidang dengan Kepala Sub bidang atau Sub bagian masing – masing. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja (2019)	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1.	Mewujudkan Masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermataabat yang berwawasan kebangsaan	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	Prosentase Penurunan Konflik Sosial	80%	80%	40%	20%	20%
			Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis	22%	16%	10%	5%	5%

3. Program Kegiatan

Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Pati sudah menerapkan Nomenklatur yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program dan kegiatan terlampir). Serta sudah menerapkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mengacu pada Pasal 274 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, SIPD menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, selanjutnya diturunkan lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 6 (enam) program 2 (dua) kegiatan dan 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Pati sebesar Rp.6.117.790.000,-. Adapun program dan kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2020 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPDinistrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
			3) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			2) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			3) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dengan telah diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara segera menindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, dan PermenPan RB No. 29 Tahun 2010 yang diubah dengan PermenPan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 memuat informasi tentang target sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran dan rencana atau target capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati. Disamping itu dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi tentang program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran dimaksud.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai Eselon II, Eselon III, Eselon IV. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati untuk Tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

A. Indikator Kinerja Utama

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dan Target Kinerja Tahun 2021

Tugas Pokok : Badan Kesbangpol Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN)/ FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	(jumlah konflik tahun n) dikurangi (konflik tahun n-1) dibagi jumlah konflik tahun n dikali 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati	Laporan Bidang Kesatuan Bangsa	40%
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	Jumlah demonstrasi anarkis dibagi jumlah kejadian demonstrasi dikali 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati	Laporan Bidang Kesatuan Bangsa	10%

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan didasarkan pada target dan Realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana yang semakin baik.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memerhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{2 (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati

Sasaran dan Strategis Program	Indikator Kinerja	Realisasi			Uraian Kinerja Tahun 2021		
		2018	2019	2020	Target	Realisasi	Capaian
1	2						
Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	-	25%	70,37%	40%	1,84%	100%
	Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	-	0%	0%	5%	0%	100%
Tercapainya jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Prosentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	47.83%	56%	0%	100%	4.76%	100%
Tercapainya partisipasi masyarakat dalam Pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu (pilkada, pilpres, pilkades)	70%	80%	35%	100%	18%	20%
Terwujudnya pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945	Prosentase pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 1945	0.05%	10%	0%	19%	120%	100%
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	NA	NA	NA	100%	0%	0%
Tersedianya dokumen rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	Prosentase dokumen rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dalam urusan pelaksanaan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik secara umum dapat dikatakan baik. Dalam pelaksanaan secara keseluruhan target kinerja belum dapat berjalan secara optimal dari pada target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid-19. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh besaran target atas indikator sasaran ada yang belum mencapai 100%.

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 (Data Terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pada Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Analisis dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati. Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 1945

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021 (%)	Realisasi (%)				% Capaian Target 2021	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
		2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prosentase penurunan konflik sosial	40	-	25%	70,37%	1,84%	190	20
Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	5	-	0%	0%	0%	100	5

Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1, indikator kinerja 1 yaitu Prosentase penurunan konflik sosial sebesar 1,84%. Hal ini diukur dari indikator persentase penurunan konflik sosial tercapai sebesar 1,84% lebih dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40% sehingga persentase capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 indikator kinerja 1 sebesar 190% atau **Kategori Sangat Baik**.

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1, indikator kinerja 2 yaitu Prosentase penurunan demonstrasi anarkis sebesar 0%. Hal ini diukur dari indikator persentase penurunan demonstrasi anarkis tercapai sebesar 100% kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20% sehingga persentase capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 indikator kinerja 2 sebesar 100% atau **Kategori Sangat Baik**.

Untuk penghitungan prosentase realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati menggunakan komponen realisasi yang kedua yaitu dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Dilihat dari table 3.3 diatas bahwa capaian indikator prosentase penurunan konflik sosial berada dalam kategori baik Karena realisasi rendah, ini menunjukkan bahwa selama tahun 2021 konflik di Kabupaten Pati relative rendah. Sedangkan untuk prosentase penurunan demonstrasi anarkis berada dalam kategori sangat baik ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pati selama tahun 2021 tidak terdapat demonstrasi yang anarkis.

Tahun 2021 rata-rata kegiatan-kegiatan yang ada di Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati semua terlaksana, biarpun masih ada refocusing anggaran sebanyak 2 kali dimana dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2020	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah dokumen kerja yang disusun	Dok	1	1	100	-	2
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	jumlah perumusan teknis bidang ideologi wawasan kebangsaan	Dok	1	1	100	-	2
Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	jumlah pelajar/siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta pembangunan moral pancasila	orang	50	50	100	-	800

Tabel 3.6
Realisasi Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2020	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah dokumen penyusunan program kerja bidang politik dalam negeri	Dok	1	1	100	1	5
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah dokumen perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri	Dok	1	1	100	-	5
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat	orang	80	80	100	70	1.900

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2020	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan selama setahun	lap	1	1	100	1	5

Tabel 3.7
Realisasi Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2020	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	dokumen program kerja yang tersusun	Dok	1	1	100	-	2
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah Ormas, LSM, OKP yang mndapat pembinaan wawasan kebangsaan jumlah rekomendasi yang dihasilkan FGD dibidang Ormas selama setahun	org	60	60	100	-	150

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2020	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah Ormas, LSM dan OKP yang termonitor tersalurnya dokumen hibah ormas	lap	1	1	100	1	4

Tabel 3.8
Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2020	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Uman beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan	orang	50	50	100	-	900

Tabel 3.9
Realisasi Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang menunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Capaian Tahun 2020	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	jumlah dokumen rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	dok	1	1	100	-	2
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	jumlah fasilitasi dibidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik jumlah fasilitasi, koordinasi intelijen, FKDM	org	45	45	100	-	1.000
Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah	terlaksananya pemantauandan pengawasan WNA dan lembaga Asing	dok	1	1	100	1	5

Analisis penyebab keberhasilan Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1 sebagai berikut :

1. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama dan Ormas/LSM dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah.
2. Adanya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda serta berbagai etnis dan paguyuban yang ada di Kabupaten Pati dalam rangka memberikan pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila guna membangun kesadaran bela negara dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi antara aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati dengan Kepolisian, Satpol PP, Kominda, Forkopimda, TNI, pihak Imigrasi, Kejati, dan Instansi terkait dalam mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
4. Sistem pelaporan cepat dan tanggap melalui Media Sosial tentang perkembangan situasi dan kondisi daerah serta pelaporan yang berkaitan dengan tugas dan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Pati.
5. Melakukan tindakan intelijen serta mengintensifkan kembali monitoring dan evaluasi situasi dan kondisi daerah.
6. Meningkatkan pendidikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada kelompok-kelompok yang dinilai memiliki perbedaan paham di masyarakat dan kelompok-kelompok radikal sebagai salah satu bentuk upaya deradikalisasi.
7. Sinergitas Ormas, toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi, seni dan budaya.

Kegiatan unggulan dalam mendukung pencapaian target kinerja pada Sasaran Strategis 1 sebagai berikut :

1. Pemantauan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik



Narasi Kegiatan Kewaspadaan Dini :

- a. Kabupaten Pati banyak terdapat orang-orang asing yang menetap karena pekerjaan, sehingga perlu di pantau keberadaanya untuk pendataan serta memantau sebelum terjadi ha-hal yang membahayakan di wilayah Kabupaten Pati.

- b. Untuk mencegah terjadinya rusaknya moral khususnya bagi pemuda di Kabupaten Pati terkait narkoba, maka Badan Kesbangpol melaksanakan koordinasi dengan tim terkait P4GN.
- c. Pemantauan Orang Asing di Pabrik Sejin fashion Kabupaten Pati.

Narasi Kegiatan Penanganan Konflik :

- a. Hoaks, ujaran kebencian, caci maki, politisasi SARA, berpotensi memecah belah Persatuan dan kesatuan Indonesia. Bangsa ini tak boleh terserak, tercabik dan terdegradasi hanya mempersoalkan perbedaan dan keragaman. Kita harus lawan itu semua, jangan biarkan masyarakat Indonesia saling bermusuhan, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Kita harus bangkit guyub bergandeng tangan menjaga negeri ini menenun spirit kebangsaan.
- b. Bila terdapat perbedaan pendapat dapat dilakukan dengan audiensi atau bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang baik tidak perlu sampai melakukan tindak kekerasan.

2. Pendidikan politik bagi pemula



Narasi kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemula :

- a. Diharapkan dengan adanya pendidikan politik bagi pemula dapat mensukseskan pesta demokrasi di Kabupaten Pati.
- b. Memberikan pengetahuan tentang etika berpolitik yang baik sehingga bisa memberi pengaruh yang positif bagi pemula terutama perempuan untuk bisa berpolitik di legislatif.
- c. Meningkatkan keterwakilan gender dalam aktifitas politik yang merujuk terpenuhinya keterwakilan perempuan badan legislatif.

3. Pembinaan Ormas dan Verifikasi Ormas



Narasi kegiatan Pembinaan Ormas dan verifikasi ormas :

- Diharapkan dengan adanya verifikasi ormas maka kelembagaan ormas di Kabupaten Pati akan terdata di Badan kesbangpol untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan.
- Memberikan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan pembumian Pancasila terhadap ormas-ormas dan LSM.
- Pemberian hibah (reward) bagi ormas-ormas/ LSM yang aktif.

4. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi



Narasi kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi:

- a. Pembinaan tentang wawasan kebangsaan dapat memupuk cinta tanah air serta menerapkan norma-norma sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Sasaran yang dibina adalah siswa-siswa SLTA sederajat dan ormas-ormas serta tokoh masyarakat.
- c. Harapannya ke depan bisa lebih banyak lagi yang mengikuti pembinaan-pembinaan terkait wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, serta sosialisasi tentang narkoba.
- d. Penguatan Paskibraka sebagai Duta Pancasila berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pati.

Dari capaian realisasi kinerja pada Sasaran Strategis 1 dapat diperoleh Skala Capaian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tahun 2021

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Skala Capaian Kinerja (%)	Predikat
1	2	3	4
Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	190	Sangat Baik
	Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	100	Baik
Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)		290	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mendapat predikat **Sangat Baik**.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pati sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan yang dihadapi lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dicapai seoptimal mungkin.

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, pada tahun anggaran 2021, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 6.117.790.000,- dengan total realisasi anggaran adalah Rp. 6.032.117.401,- (98,60%) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasional
Belanja Operasional meliputi : (1) Belanja Pegawai yang dialokasikan sebesar Rp. 1.881.899.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.848.272.485,- atau sebesar 98,21%. (2) Belanja Barang dan Jasa yang dialokasikan sebesar Rp. 683.727.000,- terealisasi sebesar Rp. 635.053.916,- atau sebesar (92,88%). (3) Belanja Hibah yang dialokasikan sebesar

Rp.3.291.382.000,- dan terealisasi 100%. Pada tahun 2021 alokasi hibah sudah diserahkan kewenangan dan pencairan di Badan Kesbangpol Kabupaten Pati dimana di tahun-tahun sebelumnya pencairan ada di BPKAD.

- Belanja Modal

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dialokasikan sebesar Rp.63.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.61.275.000,- atau 96,27%, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.197.132.000,- dengan realisasi Rp.196.134.000,- atau 99,49%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
ewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	30.100.000	25.762.150	85,59	14,41
	Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.831.240.000	1.824.148.950	99,61	0,39
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.528.200.000	1.525.597.950	99,83	0,17
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	15.000.000	13.409.900	89,40	10,60
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	35.100.000	31.342.200	89,29	10,71
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.678.150.000	2.611.856.251	97,52	2,48

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati pada tahun 2021 adalah sebanyak 6 program dengan 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan realisasi sub kegiatan sebanyak 39 sub kegiatan. Jadi ada 3 kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Pasca Pandemic Covid-19.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebagai berikut :

1. Dalam mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan berdasarkan prioritas secara efektif, efisiensi dan dapat diukur hasilnya.
2. Pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK dalam hal tertib pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
3. Kegiatan yang bersifat rutin terdapat sisa anggaran dikarenakan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan yang ada seperti sisa honorarium jasa pengajar/narasumber, sisa belanja makan/minum, sisa belanja modal dan sisa penggunaan biaya perjalanan dinas.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati secara umum **efisien**.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati tahun 2021 sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati secara keseluruhan tercapai **290%**, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **Sangat Baik**.

Efisiensi anggaran dari kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021 adalah sebesar 1,40% atau senilai Rp.82.672.599,- Hal tersebut menunjukkan penggunaan anggaran yang tertib dengan melaksanakan asas manfaat.

B. Rencana Tindak Lanjut

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, berkomitmen tinggi untuk melaksanakan tugas dan amanat yang diemban sesuai dengan Visi-Misi Bupati Pati, RPJMD dan Renstra. Dengan adanya anjuran efisiensi, Lembaga terus berinovasi dengan tujuan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Diakui bahwa tahun 2021 ini pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mengalami beberapa kendala, dan kendala tersebut telah kami evaluasi dan tetapkan langkah perbaikan atau tindaklanjut untuk meningkatkan kinerjanya. Rencana tindaklanjut meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas Perencanaan agar dokumen Perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan koordinasi dan melakukan penataan Birokrasi, sehingga terwujud penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

- c. Memberdayakan segala potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati yaitu dengan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan komitmen karyawan dan karyawan agar mau dan mampu berusaha lebih optimal dalam mencapai target.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua Bidang secara berkala.
- e. Menguatkan komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk penyusunan Kegiatan/Kinerja pada masa mendatang.

Pati, Februari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI



Drs. SUGIYONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 199310 1 001

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NASIKUN, SH., MM

Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO, SH., MM., M.Si

Jabatan : Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 19 Januari 2021

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pati
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan
Keuangan



HARYANTO, SH, MM, M.Si



NASIKUN, SH, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	40%
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	10%
2.	Tercapainya jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	Prosentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100%
3.	Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada, Pilpres, Pilkadaes)	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada, Pilpres, Pilkadaes)	100%
4.	Terwujudnya pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	Pertumbuhan LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	19%
5.	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Prosentase partisipasi masyarakat dalam peningkatan akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100%
6.	Tersedianya dokumen rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	Prosentase tersedianya dokumen rekomendasi penanggulangan gangguan keamanan	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 60.200.000	APBD KAB
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.856.852.000	APBD KAB
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.608.200.000	APBD KAB
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 30.000.000	APBD KAB
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Rp. 70.200.000	APBD KAB

Pati, 19 Januari 2021

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pati
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan
Keuangan



NASIKUN, SH, MM

Pihak Kedua,
Bupati Pati



HARYANTO, SH, MM, M.Si

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	20%
		Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	5%

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pati
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan
Keuangan



NASIKUN, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670304 198903 1 009

**LAPORAN DATA KINERJA TRI WULAN IV
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI TAHUN 2021**

1. SASARAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN PANCASILA DAN UUD 1945									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a. Penurunan konflik sosial	(jumlah konflik tahun n)-(konflik tahun n-1) dibagi Jumlah konflik tahun n kali 100%	Jumlah konflik th 2021 = 12 Jumlah konflik th 2020 = 54	= $(19-54)/19 \times 100\%$ = $35/19 \times 100\%$ = 1,84%	1,84%	20%	1. Program	30.100.000	25.562.150	84,92
						Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
						Kegiatan	30.100.000	25.562.150	84,92
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
b. Persentase Demonstrasi Anarkis	Jumlah Demonstrasi anarkis dibagi jumlah Kejadian Demonstrasi x 100 %	Jumlah demonstrasi 2021 = 6 Jumlah demonstrasi anarkis 2021 = 0	= $0/6 \times 100\%$ = 0%	0%	5%	Sub Kegiatan			
						1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.850.000	4.396.500	90,65
						2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.500.000	2.340.300	93,61

1. SASARAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN PANCASILA DAN UUD 1945									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	22.750.000	18.825.350	82,75
						2 Program	1.528.200.000	1.524.992.950	99,79
						Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
						Kegiatan	1.528.200.000	1.524.992.950	99,79
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
						Sub Kegiatan			
						1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.200.000	4.278.100	82,27

1. SASARAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN PANCASILA DAN UUD 1945									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2) Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15.000.000	13.499.550	90,00
						3) Pelaksanaan onitoring Evaluasi dan Pelapoan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.508.000.000	1.507.215.300	99,95
						3 Program	15.000.000	13.409.900	89,40
						Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
						Kegiatan	15.000.000	13.409.900	89,40
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			

1. SASARAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN PANCASILA DAN UUD 1945									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan			
						1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15.000.000	13.409.900	89,40
						4 Program	35.100.000	31.467.200	89,65
						Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
						Kegiatan	35.100.000	31.467.200	89,65
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			

1. SASARAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN PANCASILA DAN UUD 1945									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan			
						1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik di Daerah	7.002.000	6.294.200	89,89
						2) Pelaksanaan Koodinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14.140.000	12.675.500	89,64

1. SASARAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN PANCASILA DAN UUD 1945									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah	13.958.000	12.497.500	89,54
					5	Program	1.831.240.000	1.824.148.950	99,61
						Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
						Kegiatan	1.831.240.000	1.824.148.950	99,61
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik			

1. SASARAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN PANCASILA DAN UUD 1945									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan			
						1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.225.000	1.712.600	76,97
						2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	7.715.000	7.173.400	92,98

1. SASARAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN PANCASILA DAN UUD 1945									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						3) Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.817.497.000	1.812.202.600	99,71
						4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.803.000	3.060.350	80,47
1. Data	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil dari pemantauan di lapangan Kerjasama dengan mitra Badan kesbangpol Kabupaten Pati 								

1. SASARAN : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN PANCASILA DAN UUD 1945									
INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	TARGET 2022	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%) PENGGUNAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Hambatan	1. Kurangnya personil dalam melakukan pemantauan lapangan 2. Masih minimnya penganggaran yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Pati serta adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid 19								
3. Rencana Aksi	1. Pemanfaatan media sosial dalam melakukan pemantauan wilayah 2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mendapatkan informasi sesuai tupoksi								

Pati, Desember 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI



Drs. SUGIYONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 199310 1 001

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 45	Prosentase penurunan konflik sosial	40%	1,84%	100%	penanganan konflik tertangani dengan baik
	Prosentase penurunan demonstrasi anarkis	5%	0%	100%	Tidak ada demonstrasi anarkis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	100%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100%	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32 stel	-	0%	refocusing
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 org	-	0%	refocusing

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 jenis	12 jenis	100%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 jenis	63 jenis	100%	pengendalian kegiatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13,866 lembar	13,866 lembar	100%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	2 jenis	100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 lap	85 lap	89,47	pengendalian kegiatan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 org	1 org	100%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	0%	refocusing
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 set	-	0%	refocusing
Belanja Modal Bangunan Gedung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	100%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	8 unit	100%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600 surat	2.600 surat	100%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28 rekening	28 rekening	100%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.700 m2	1.700 m2	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	18 unit	100%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17 unit	17 unit	100%	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 org	50 org	100%	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	90 org	90 org	100%	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 lap	1 lap	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 org	50 org	100%	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 lap	1 lap	100%	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	45 org	45 org	100%	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 lap	1 lap	100%	

Pati, Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pati



Drs. SUGIYONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670303 199310 1 001

BAKESBANGPOL KABUPATEN PATI

Jl. Kolonel Sugiono No. 77 Pati T (0295) 383231 Fax 384324

Email : kesbangpolkabpati@gmail.com